

Unika Gelar Kompetisi Nasional SCF

SEMARANG (KR) - Universitas Katolik (Unika) Soegija Pranata Semarang menggelar Soegijapranata Choral Festival (SCF) yang diikuti 32 tim dari berbagai daerah di antaranya NTT, Bengkulu, Pasuruan, Purwokerto, Surabaya, Tangerang, Bandung, Malang dan Semarang. Viona, ketua pengarah Soegijapranata Choral Festival (SCF) 2022 kepada pers Rabu (14/9) menyatakan festival bertujuan mengenalkan paduan suara di tingkat Nasional dan Internasional, juga mengenalkan nama Unika Soegijapranata dan Indonesia. Unika ingin mengenalkan paduan suara kepada masyarakat baik tingkat Nasional maupun Internasional.

Kompetisi ini menemukan 6 pemenang dari berbagai kategori yaitu Angelus Voice (Children's Category), Domenico Savio Choir (Teenager Category), Don Bosko Choir (Mixed Youth Choir), Chandelier Choir (Mixed Choir), Administratio Choir (Folklore) dan Paduan Suara (Universitas Airlangga Equal Voices). (Sgi)



KR-Sugeng Irianto

Salah satu tim peserta festival.

Tolak Kenaikan Harga BBM FPKS Lakukan Interupsi

SEMARANG (KR) - Sikap tegas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tidak hanya dilakukan melalui pernyataan sikap. Di Jateng, FPKS DPRD Jateng menginstruksi jalannya sidang paripurna untuk menyampaikan penolakan saat sidang paripurna Selasa (13/9). Intrupsi dilakukan oleh Ketua FPKS Agung Budi Margono. Agung mengatakan instruksi saat sidang paripurna merupakan bentuk penyaluran aspirasi dari masyarakat serta respons terhadap perkembangan bahwa masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.

FPKS berharap aspirasi masyarakat tersebut bisa disampaikan kepada pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan. "Ini juga merupakan tanggung jawab konstitusi seluruh Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar didengar oleh pemerintah," tegas Agung. PKS tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM karena kebijakan tersebut sangat menyulitkan masyarakat, khususnya rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. "Izinkan kami untuk menyampaikan sikap kami secara simbolis (angkat kertas) bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM," pungkas Agung Budi Margono. Penolakan kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM melalui intrupsi saat sidang paripurna, juga dilakukan oleh seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Jateng, termasuk Wakil Ketua DPRD Jateng H Quatly Abdulkadir Alkatiri. (Bdi)



KR-Budiono

Anggota FPKS DPRD Jateng menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dalam sidang paripurna.

RUWAT NUSANTARA DI TAMAN LUMBINI BOROBUDUR

Juga Diikuti Masyarakat Adat Beberapa Daerah

AREA Taman Lumbini di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) menjadi lokasi kegiatan Ruwat Bumi atau Ruwat Nusantara, yang juga dihadiri delegasi peserta G20 sektor budaya, Selasa (13/9) malam.

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbud Sjamul Hadi kepada wartawan usai rangkaian acara mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan puncak dari Ruwat Nusantara yang diselenggarakan oleh masing-masing masyarakat adat, sejak wilayah barat, tengah dan timur.

Seluruh masyarakat adat diundang, melalui

pemangku adatnya, dan juga pelaku ritual yang telah diselenggarakan sejak Bulan Januari hingga Bulan Agustus akhir.

Di forum ini dilakukan doa untuk kembalinya bumi menjadi aman, dijauhkan dari penyakit dan marabahaya.

Sehingga nantinya ketika mereka kembali ke daerah masing-masing diharapkan tetap melanjutkan pelestarian budaya spiritualnya. Doanya dari berbagai suku di Nusantara dari Sabang hingga Merauke.

Melalui pertemuan tingkat Menteri Kebudayaan kelompok G20 membangun komitmen bersama di era New Normal sehingga nantinya negara-

negara dunia ikut serta, melalui jalan kebudayaan, untuk mengembalikan dari air, udara dan api menjadi satu kesatuan kosmik. Melalui jalan kebudayaan di negara-negara peserta G20 ini untuk kedamaian dunia.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilmar Farid secara terpisah kepada wartawan mengatakan dikombinasikan antara Program Indonesia Berturut 2022 dengan pertemuan Menteri bidang Kebudayaan G20.

Selasa malam itu juga dihadiri banyak pihak dari banyak daerah, yang semuanya mengucapkan syukur. "Dan juga berdoa agar bumi kita tetap lestari," kata Dirjen Kebudayaan.

Dikatakan, ada 2 hal yang ditekankan dalam pertemuan Menteri bidang Kebudayaan, di antaranya cara menggunakan sumber daya kebudayaan untuk pelestarian lingkungan dan bumi.

Ini diharapkan menjadi kedekatan dalam pembangunan yang lebih memperhatikan kearifan-kearifan lokal dan sangat mengutamakan keberlanjutan.

Juga diangkat mengenai dana global untuk seni

dan pekerja budaya, karena selama masa pandemi Covid-19 banyak yang kesulitan dalam kehidupannya, diantaranya karena tidak bisa berkarya, tidak bisa pentas, tidak bisa tampil.

Sementara itu pada Selasa sore lalu Kemendikbud Ristek memberikan apresiasi kepada para tokoh dan tenaga pemugar Candi Borobudur atas sumbangsinya dengan wujud prasasti yang mencantumkan nama-nama tokoh dan pemugar Candi Borobudur. Prasasti ditandatangani Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim.

"Beberapa hari ini saya mendengar banyak pujian dari delegasi negara-negara G20 dengan pengalaman mereka di Borobudur. Dan semua itu adalah kerja keras Bapak dan Ibu dalam memugar Candi Borobudur pada tahun 1973-1983, sehingga kita dapat menyaksikan keindahannya seperti sekarang," kata Mendikbud Ristek sambil menambahkan prasasti ini sebagai catatan sejarah, agar menjadi dapat diingat serta menjadi penyemangat bagi generasi penerus untuk terus melestarikan warisan budaya leluhur. (Tha)

TOLAK KENAIKAN HARGA BBM

Massa Demo di Tugu Adipura Klaten

KLATEN (KR) - Massa dari berbagai komunitas organisasi massa (ormas) Islam yang tergabung dalam Aliansi Laskar Islam Klaten menggelar demo di simpang tiga Tugu Adipura Klaten, Selasa (13/9). Mereka menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM, karena kenaikan harga saat ini dinilai membebani rakyat.

Para demonstran bergerak dari Monumen Juang 45 dengan menggunakan mobil dan sepeda motor, sambil berorasi di sepanjang jalan. Mereka juga membawa atribut berupa spanduk berisi penolakan kenaikan harga BBM.

Selain itu, mereka juga

bernyanyi dengan lirik yang telah mereka ganti berisikan sindiran terhadap kebijakan pemerintah.

Nanang Nuryanto, salah satu koordinator aksi mengemukakan, yang turun dalam aksi tersebut adalah Aliansi Laskar Islam Klaten, didukung seluruh anggota elemen yang ada.

Terdiri Umar Bin Khotob, PMJ, Barisan Muda Klaten, Majelis Mujahidin, Santri Nekad Klaten, dan FUI.

"Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi meninjau kembali untuk menurunkan harga BBM. Saat masyarakat baru lolos dari pandemi Covid-19 kok sudah dihadang kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM

akan membawa dampak besar, karena akan diikuti kenaikan harga-harga yang lain," kata Nanang Nuryanto.

Massa menolak kenaikan harga BBM, dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan harga BBM seperti semula. Mereka mengaku akan terus melakukan aksi lanjutan yang lebih besa, hingga kenaikan harga BBM tersebut dibatalkan.

Waka Polres Klaten, Kompol Sumiarta mengemukakan, pengamanan aksi dengan melibatkan sekitar 255 orang. Terdiri personil TNI sebanyak 50 orang, Polri 150 orang, Dishub 25 orang, Satpol 30 orang.



KR-Sri Warsiti

Massa berorasi di seputar Tugu Adipura.

Menurut Waka Polres, untuk kelancaran arus lalu lintas, kendaraan besar yang akan masuk kota dialihkan melalui jalan bypass. Baik yang dari arah Tegalyoso maupun dari simpang tiga Al Aqsha.

"Alhamdulillah sudah kita galang dari saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi mereka beraksi dengan damai, tetap kita kawal dan kita amankan," kata Waka Polres. (Sit)

Pernyataan Effendy Simbolon Tidak Pantas

SALATIGA (KR) - Komandan Korem 073 Makutarama (MKT) Salatiga, Kolonel Inf Purnomosidi menyatakan dirinya marah dan tersinggung atas pernyataan salah satu anggota DPR RI, Effendy Simbolon yang mengatakan TNI adalah gerombolan.

"Secara pribadi maupun sebagai Danrem 073 MKT saya tersinggung dan marah atas pernyataan anggota DPR RI yang tidak pantas untuk dikatakan terhadap TNI. Kami sangat marah dan tersinggung," tandas Kolonel Purnomosidi kepada para wartawan, Selasa (13/9) di Korem 073 MKT Salatiga.

Danrem 073 MKT Salatiga juga menyatakan agar Dandim di jajaran 073 MKT yang berada di dua eks Karesidenan Semarang menyatakan sikap bersama membela TNI dan akan lebih bagus lagi dukungan dari masyarakat, tokoh agama dan media massa mengancam pernyataan anggota DPR RI yang menuding TNI de-

ngan pernyataan seenaknya dan menyinggung institusi TNI.

"Pernyataan ES anggota DPR RI tidak pantas sebagai wakil rakyat. Kalau TNI tidak solid dan dikatakan gerombolan, tentu negara ini sudah hancur. TNI Tetap solid dan loyal kepada NKRI," tandas Kolonel Purnomosidi.

Pernyataan keras juga dilontarkan, Komandan Kodim (Dandim) 0714 Salatiga Letkol Ade P Siregar.

Menurutnya, apa yang dilontarkan Effendy Simbolon (ES) di Forum intelektual DPR RI sangat tidak patut dan bukan contoh

yang baik.

"Saya sebagai seorang prajurit yang digembeng untuk membela NKRI, atasan, kesatuan dan harga diri merasa panas dengan ucapan tersebut. Kami harus bisa mengendalikannya diri," tandas Dandim 0714 Salatiga.

Letkol Ade P Siregar mengungkapkan dirinya tidak akan mengambil langkah melampaui pimpinan TNI. Peristiwa ini sangat menyinggung TNI dan tidak terima dengan sikap oknum anggota DPR RI yang telah merendahkan pimpinan tertinggi TNI di forum Komisi I DPR RI. (Sus)

Jateng dan Balikpapan Tampil di Rakornas PPPA

SEMARANG (KR) - Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2022 (Rakornas PPPA), dua perwakilan dari dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota, yaitu Provinsi Jateng dan Kota Balikpapan, ditunjuk untuk memaparkan praktik baik penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang telah dilakukan di daerahnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi, menyampaikan fokus DP3AP2KB Provinsi Jateng berakar dari 5 (lima) arahan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu penu-

runan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data Simfoni PPA Tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi keempat tertinggi dengan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Simfoni PPA pun mencatat, jenis kekerasan yang paling banyak dialami di Provinsi Jateng adalah kekerasan dengan persentase 38,6% terhadap perempuan dewasa dan kekerasan seksual terhadap anak dengan persentase 52,9%.

"Hal tersebut merupakan potret yang cukup buruk bagi Provinsi Jateng. Karena itulah dalam dua tahun ke belakang ini, kami menyusun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mendukung Perda yang sudah ada di dua tahun ini," ujar Retno.

Dalam hal upaya pencegahan, berbagai macam program yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jateng pun turut disampaikan Retno, diantaranya melalui (1) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan mengadakan Ngobrol Topik Perempuan dan Anak (Ngopi Penak) serta instagram live, (2) Gerakan Jogo Konco yang merupakan perwujudan implementasi konsep peran anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam upaya saling melindungi dan mendorong pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi, (3) Gerakan Jo Kawin Bocah yang merupakan implementasi dari Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dengan penguatan regulasi/kebijakan perlindungan anak, pelibatan pentahelix, penda-

an dan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lalu kami juga menyusun beberapa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mendukung Perda yang sudah ada di dua tahun ini," ujar Retno.

Dalam hal upaya pencegahan, berbagai macam program yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jateng pun turut disampaikan Retno, diantaranya melalui (1) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan mengadakan Ngobrol Topik Perempuan dan Anak (Ngopi Penak) serta instagram live, (2) Gerakan Jogo Konco yang merupakan perwujudan implementasi konsep peran anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam upaya saling melindungi dan mendorong pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi, (3) Gerakan Jo Kawin Bocah yang merupakan implementasi dari Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dengan penguatan regulasi/kebijakan perlindungan anak, pelibatan pentahelix, penda-

taan melalui Aplikasi Pemetaan Kelompok Rentan Perempuan dan Anak serta Pasangan Usia Subur (APEM KETAN), pelatihan keterampilan hidup bagi remaja, layanan care center Jo Kawin Bocah, serta gelar ekspo Jo Kawin Bocah, (4) Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan program desa yang memenuhi prasarana dasar dan menyejahterakan masyarakat (Destara), dan (5) Flexi Time bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya perempuan, agar orang tua dapat memiliki waktu lebih dalam memberikan perhatian kepada anak.

"Dalam hal penanganan, di Jawa Tengah sebelumnya sudah terbentuk layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun pada 2018 hilang dan kini sedang kami proses pembentukannya kembali dan sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri sehingga tahun ini diharapkan sudah terbentuk. Selain itu, kami juga memiliki sumber daya manusia (SDM) kompeten yang

akan membantu di UPTD PPA nantinya," jelas Retno.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Alwiati mengemukakan layanan UPTD PPA Kota Balikpapan sudah dimanfaatkan secara luar biasa oleh masyarakat. Terdapat 6 (enam) layanan yang dimiliki, yakni pengaduan masyarakat, penjangkauan klien, pengelolaan kasus, penampungan sementara di rumah perlindungan, mediasi, serta pendampingan klien.

"Selain 6 (enam) layanan tersebut, kami juga sudah mulai menjangkau pelayanan berbasis online melalui aplikasi Layanan Pengaduan dan Pelaporan Perempuan dan Anak yang Mendapat Kekerasan di Balikpapan (Lapor Pak! Balikpapan) yang sudah dapat diunduh melalui aplikasi playstore. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat memiliki akses secara langsung untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilihat atau dialami," kata Alwiati. (Ati)

Mimbar Legislatif

Komisi C Soroti Muatan Lokal Raperda PKD

KOMISI C DPRD Jateng kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) di ruang rapat komisi, Selasa (13/9).

Dalam rapat, Komisi C menyoroti local wisdom atau muatan lokal yang tercantum dalam draft Raperda. Demikian dikatakan Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Haryanto saat rapat dengan pendapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Komisi C menilai muatan lokal masih diperlukan dalam Raperda. Dengan dicantumkannya muatan lokal, diyakini bisa meningkatkan pendapatan sekaligus kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu muatan lokal yang perlu dikaji adalah tata kelola keuangan sekolah di SMA maupun SMK. OPD yang hadir dalam rapat dengan pendapat dengan

Komisi C DPRD Jateng diantaranya Bapenda, BP-KAD, dan Biro Hukum Setda Provinsi Jateng.

Masing-masing OPD tersebut memberikan paparan berupa saran dan masukan kepada Komisi C sebagai informasi dalam penyusunan draft Raperda.

Anggota Komisi C DPRD Jateng Zainudin mengatakan, Raperda yang sedang dibahas di Komisi C tersebut merupakan mandat dari regulasi di atasnya.

Untuk itu, perlu adanya muatan lokal dalam draft Raperda. Hanya saja, apakah muatan lokal itu bisa seiring dengan Peraturan Pemerintah (PP), hal itu yang perlu dikaji kembali. (*)

(Disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Haryanto kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)



KR-Thoha

Mendikbud Ristek, Gubernur Jateng, dan delegasi peserta G20 bidang Kebudayaan usai acara Ruwat Nusantara.